



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 40 Tahun 2020

Seri A Nomor 4

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 40 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 138 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 4 Tahun 2020

Seri A

Tanggal 19 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 40 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 138 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19 Tahun Anggaran 2020, dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, Pemerintah Daerah harus melakukan *refocussing* kegiatan dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*;

- c. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 900/2040/BPKAD tanggal 22 April 2020 perihal Penyesuaian Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka harus dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Transfer tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61780);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 33);
21. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
22. Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1788);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37);
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99);
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);

35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease 2019 COVID-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
36. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia HK.01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan dan/atau Penanganan *COVID-19* Tahun Anggaran 2020;
37. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
38. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 25);
39. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);

40. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
41. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
42. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 9 Seri A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 138 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 2 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 138 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 9 Seri A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 138 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor Seri A), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:

a. Pendapatan:

| | | |
|---|----|----------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah | Rp | 719.591.715.596,00 |
| 2. Dana Perimbangan | Rp | 1.062.695.748.295,00 |
| 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Rp | 523.850.612.775,00 |
| Jumlah Pendapatan Daerah | Rp | 2.306.138.076.666,00 |

b. Belanja:

| | | |
|---------------------------|----|----------------------|
| 1. Belanja Tidak Langsung | | |
| a) Belanja Pegawai | Rp | 1.113.564.137.873,00 |
| b) Belanja Bunga | Rp | 8.010.000.000,00 |
| c) Belanja Hibah | Rp | 52.566.704.687,00 |
| d) Belanja Bantuan Sosial | Rp | 37.620.214.500,00 |

| | | | | |
|----|---|-----------------------|----|----------------------|
| e) | Belanja Keuangan Pemerintah lainnya/Parpol | Bantuan kepada Daerah | Rp | 1.134.531.000,00 |
| f) | Belanja Tidak Terduga | | Rp | 213.022.922.728,00 |
| 2. | Belanja Langsung | | | |
| a) | Belanja Pegawai | | Rp | 88.226.655.590,00 |
| b) | Belanja Barang dan Jasa | | Rp | 743.333.032.399,00 |
| c) | Belanja Modal | | Rp | 289.178.834.604,00 |
| | Jumlah Belanja Daerah | | Rp | 2.546.657.033.381,00 |
| | Defisit | | Rp | -240.518.956.715,00 |
| c. | Pembiayaan: | | | |
| 1. | Penerimaan | | Rp | 416.175.153.575,00 |
| 2. | Pengeluaran | | Rp | 175.656.196.860,00 |
| | Jumlah Pembiayaan Neto | | Rp | 240.518.956.715,00 |
| | Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan | | Rp | Rp 0,00 |

2. Ketentuan yang tertuang dalam Lampiran I RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 diubah, sehingga keseluruhan Ringkasan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan yang tertuang dalam Lampiran II PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 diubah:

- a. Pengurangan Pendapatan Asli Daerah
- b. Penambahan Belanja Tidak Terduga

- c. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga PD Pada Dinas Pendidikan
- d. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor Pada Dinas Pendidikan
- e. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Pada Dinas Pendidikan
- f. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Informasi Publik Pada Dinas Pendidikan
- g. Pengurangan Anggaran Kegiatan Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial Pada Dinas Pendidikan
- h. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pendataan dan Profil Pendidikan berbasis Web Pada Dinas Pendidikan
- i. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemutakhiran Dapodik PNFI (Data Pokok Pendidikan - Pendidikan Non Formal dan Informal) Pada Dinas Pendidikan
- j. Pengurangan Anggaran Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP Pada Dinas Pendidikan
- k. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengelolaan BOS Kota Pada Dinas Pendidikan

- l. Pengurangan Anggaran Kegiatan Penerimaan Siswa Didik Baru Online Pada Dinas Pendidikan
- m. Pengurangan Anggaran Kegiatan BOS Kota TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri Pada Dinas Pendidikan
- n. Pengurangan Anggaran Kegiatan Mentoring Penanganan Penyimpangan Prilaku Pada Dinas Pendidikan
- o. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengadaan Raport, Sertifikat dan Kartu NISN Pada Dinas Pendidikan
- p. Pengurangan Anggaran Kegiatan Peningkatan Kompetensi Siswa SD Pada Dinas Pendidikan
- q. Pengurangan Anggaran Kegiatan Peningkatan Kompetensi Siswa SMP Pada Dinas Pendidikan
- r. Pengurangan Anggaran Kegiatan Peningkatan Kompetensi Warga Belajar DIKMAS Pada Dinas Pendidikan
- s. Penambahan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga PD Pada Dinas Kesehatan
- t. Pengurangan Anggaran Kegiatan Jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) di luar kuota jamkesmas Pada Dinas Kesehatan
- u. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Gizi Masyarakat Pada Dinas Kesehatan

- v. Pengurangan Anggaran Kegiatan Penyusunan FS Pembiayaan Pembangunan RSUD Kota Bogor Pada Rumah Sakit Umum Daerah
- w. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- x. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pembangunan Mesjid Agung Kota Bogor Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- y. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah 1 Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- z. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah 2 Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- aa. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah 3 Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- bb. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Saluran, Sungai, Situ Wilayah Wilayah I Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- cc. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Saluran, Sungai, Situ Wilayah Wilayah 2 Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- dd. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengelolaan IPAL dan IPLT Tegal Gundil Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- ee. Pengurangan Anggaran Kegiatan Penyediaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Penunjang IPAL dan IPLT Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- ff. Pengurangan Anggaran Kegiatan Optimalisasi Infrastruktur Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- gg. Pengurangan Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Tim koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- hh. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pembangunan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase wilayah 2 Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- ii. Pengurangan Anggaran Kegiatan Peningkatan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase wilayah 1 Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- jj. Pengurangan Anggaran Kegiatan Peningkatan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase wilayah 2 Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- kk. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pembangunan Jembatan (Pembangunan Jembatan Jalan Otto Iskandar Dinata) (Bankeu Prov Jabar 2020) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- ll. Pengurangan Anggaran Kegiatan Peningkatan Jalan (Suryakencana) (Kawasan Suryakencana, Kec. BOGOR TENGAH, Kota Bogor) (Bankeu Prov Jabar 2020) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- mm. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur Permukiman Wilayah I (Kec. Tanah sereal) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- nn. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur Permukiman Wilayah I (Kec. Bogor Utara) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- oo. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur Permukiman Wilayah II (Kec. Bogor Timur) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- pp. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur Permukiman Wilayah II (Kec. Bogor Selatan) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- qq. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur Permukiman Wilayah III (Kec. Bogor Barat) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- rr. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur Permukiman Wilayah III (Kec. Bogor Tengah) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- ss. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga PD Pada Dinas Perumahan Dan Permukiman
- tt. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Pada Dinas Perumahan Dan Permukiman
- uu. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin Ruang Terbuka Hijau Pada Dinas Perumahan Dan Permukiman
- vv. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pada Dinas Perumahan Dan Permukiman

- ww. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Pemeliharaan Taman Pada Dinas Perumahan Dan Permukiman
- xx. Pengurangan Anggaran Kegiatan Perbaikan Rumah dan PSU di lokasi bencana Pada Dinas Perumahan Dan Permukiman
- yy. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pendukung RLH Pada Dinas Perumahan Dan Permukiman
- zz. Pengurangan Anggaran Kegiatan Penanganan Kumuh Pada Dinas Perumahan Dan Permukiman
- aaa. Pengurangan Anggaran Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan/ Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Kawasan Kumuh Pada Dinas Perumahan Dan Permukiman
- bbb. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemasangan Lampu PJU lingkungan permukiman di Kota Bogor Pada Dinas Perumahan Dan Permukiman
- ccc. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemasangan Lampu Taman, Jembatan dan Jalur Hijau RTH Pada Dinas Perumahan Dan Permukiman
- ddd. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pembayaran Rekening PJU Pada Dinas Perumahan Dan Permukiman

- eee. Pengurangan Anggaran Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan PJU Pada Dinas Perumahan Dan Permukiman
- fff. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Panel PJU, Lampu PJU Dan Lampu Highmast Pada Dinas Perumahan Dan Permukiman
- ggg. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Dekorasi Kota Pada Dinas Perumahan Dan Permukiman
- hhh. Pengurangan Anggaran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pemakaman Pada Dinas Perumahan Dan Permukiman
- iii. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Rusunawa Pada Dinas Perumahan Dan Permukiman
- jjj. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengembangan, Pemeliharaan dan Perbaikan Rusunawa Pada Dinas Perumahan Dan Permukiman
- kkk. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga PD Pada Satuan Polisi Pamong Praja
- lll. Pengurangan Anggaran Kegiatan Penyediaan Anggota Bantuan Polisi Pamong Praja Pada Satuan Polisi Pamong Praja
- mmm. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga PD Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- nnn. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- ooo. Pengurangan Anggaran Kegiatan Hunian Sementara bagi Korban Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- ppp. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- qqq. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pendataan Inventarisasi Dampak Pasca Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- rrr. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pelatihan dan Pemberdayaan Kelurahan Tangguh Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- sss. Pengurangan Anggaran Kegiatan Penerapan Sekolah Aman Bencana (SMAB) dan Simulasi Penanggulangan Bencana di Sekolah Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- ttt. Pengurangan Anggaran Kegiatan Peningkatan Kapasitas Relawan Bencana Alam Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- uuu. Pengurangan Anggaran Kegiatan Simulasi Kebencanaan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- vvv. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga SKPD Pada Dinas Sosial
- www. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Pada Dinas Sosial
- xxx. Pengurangan Anggaran Kegiatan Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos) Pada Dinas Sosial
- yyy. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengembangan Aplikasi PMKS dan PSKS Pada Dinas Sosial
- zzz. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pembinaan Keluarga Sangat Miskin (KSM) dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Dinas Sosial
- aaaa. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemberdayaan Lanjut Usia Terlantar Pada Dinas Sosial
- bbbb. Pengurangan Anggaran Kegiatan Verifikasi dan Validasi BDT (Basis Data Terpadu) Pada Dinas Sosial
- cccc. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana dalam Penanggulangan Bencana Pada Dinas Sosial
- dddd. Pengurangan Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Pangan Non Tunai Pada Dinas Sosial
- eeee. Pengurangan Anggaran Kegiatan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pada Dinas Sosial

- ffff. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pembinaan bagi Wanita Tuna Susila, Kelompok Minoritas dan Eks Narapidana Pada Dinas Sosial
- gggg. Pengurangan Anggaran Kegiatan Penanganan Anak Terlantar dan Proses Adopsi Anak Terlantar Pada Dinas Sosial
- hhhh. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat Pada Dinas Sosial
- iiii. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sosial dan Sumbangan Sosial Pada Dinas Sosial
- jjjj. Pengurangan Anggaran Kegiatan Penumbuhan Pusat Kesejahteraan Sosial Kota Bogor Pada Dinas Sosial
- kkkk. Pengurangan Anggaran Kegiatan Peningkatan Kapasitas LK3 Pada Dinas Sosial
- llll. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pembekalan Calon Relawan Penyuluh Sosial Masyarakat Pada Dinas Sosial
- mmmm. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga PD Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
- nnnn. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Hubungan Industrial dan Organisasi Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

- oooo. Pengurangan Anggaran Kegiatan Informasi pasar kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
- pppp. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencaker dan Penganggur (Enterpreunership) Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
- qqqq. Pengurangan Anggaran Kegiatan Uji Kompetensi Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
- rrrr. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
- ssss. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pelatihan Melalui Pemagangan Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
- tttt. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga PD Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
- uuuu. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
- vvvv. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga PD Pada Dinas Lingkungan Hidup
- wwww. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Kebersihan Berbasis

Masyarakat Pada Dinas Lingkungan Hidup

- xxxxx. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor Pada Dinas Lingkungan Hidup
- yyyy. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Pada Dinas Lingkungan Hidup
- zzzz. Pengurangan Anggaran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perbengkelan Pada Dinas Lingkungan Hidup
- aaaaa. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pelayanan Persampahan Pada Dinas Lingkungan Hidup
- bbbbb. Pengurangan Anggaran Kegiatan Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Pada Dinas Lingkungan Hidup
- ccccc. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPA Galuga Pada Dinas Lingkungan Hidup
- dddd. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengadaan Alat Berat Pada Dinas Lingkungan Hidup
- eeee. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pengurangan Sampah 3R Berbasis Masyarakat Pada Dinas Lingkungan Hidup

- fffff. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Sampah dengan 3R Pada Dinas Lingkungan Hidup
- ggggg. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup
- hhhhh. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah I Pada Dinas Lingkungan Hidup
- iiii. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah II Pada Dinas Lingkungan Hidup
- jjjj. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah III Pada Dinas Lingkungan Hidup
- kkkkk. Pengurangan Anggaran Kegiatan Identifikasi Timbulan Sampah Limbah B3 Pada Dinas Lingkungan Hidup
- llll. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Pada Dinas Lingkungan Hidup
- mmmmm. Pengurangan Anggaran Kegiatan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup

- nnnnn. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga PD Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- ooooo. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- ppppp. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- qqqqq. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengadaan Blanko Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- rrrrr. Pengurangan Anggaran Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- sssss. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pelayanan dasar Administrasi kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- ttttt. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pelayanan Publik Akte Kelahiran Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

- uuuuu. Pengurangan Anggaran Kegiatan Penataan Dokumen dan Registrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- vvvvv. Pengurangan Anggaran Kegiatan Indeks kepuasan masyarakat Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- wwwww. Pengurangan Anggaran Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Administrasi Kependudukan (Adminduk) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- xxxxxx. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi SIAK, SITANDUK dan Blue Room Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- yyyyy. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga PD Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak
- zzzzz. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak
- aaaaaa. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak

- bbbbbb. Pengurangan Anggaran Kegiatan Penyusunan Profil Perempuan Kota Bogor Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak
- cccccc. Pengurangan Anggaran Kegiatan Penyusunan Profil Anak Kota Bogor Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak
- dddddd. Pengurangan Anggaran Kegiatan Peningkatan kemandirian lembaga kemasyarakatan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak
- eeeeee. Pengurangan Anggaran Kegiatan TNI Manunggal Satata Sariksa (TMSS) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak
- ffffff. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak
- gggggg. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pembinaan PKK Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak
- hhhhhh. Pengurangan Anggaran Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pokjandal Posyandu Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak

- iiiiii. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak
- jjjjjj. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Syariah Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak
- kkkkkk. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pembinaan dan pengembangan kelembagaan perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak
- llllll. Pengurangan Anggaran Kegiatan Advokasi dan Fasilitasi pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak
- mmmmmm. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak
- nnnnnn. Pengurangan Anggaran Kegiatan Penguatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak

- oooooo. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga PD Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
- pppppp. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pelayanan KB Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
- qqqqqq. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Pelayanan KB Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
- rrrrrr. Pengurangan Anggaran Kegiatan Penggerakan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
- ssssss. Pengurangan Anggaran Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Kampung KB Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
- tttttt. Pengurangan Anggaran Kegiatan Kemitraan KKBPK Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
- uuuuuu. Pengurangan Anggaran Kegiatan Peningkatan Promosi Kesehatan 1000 HPK Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
- vvvvvv. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga PD Pada Dinas Perhubungan

| | |
|----------|---|
| wwwwww. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pembayaran Rekening Listrik Fasilitas Pendukung Lalu Lintas Pada Dinas Perhubungan |
| xxxxxxx. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor Pada Dinas Perhubungan |
| yyyyyy. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Pada Dinas Perhubungan |
| zzzzzz. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Sarana & Prasarana BITS (Bogor Intelligent Transport System) Pada Dinas Perhubungan |
| aaaaaaa. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan BITS (Bogor Intelligent Transport System) Pada Dinas Perhubungan |
| bbbbbbb. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengadaan Media (sarana) Sosialisasi dan Pendidikan Keselamatan Transportasi Pada Dinas Perhubungan |
| ccccccc. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Sosialisasi Sadar Tertib Berlalu lintas (Dartiblantas) di Jalan Pada Dinas Perhubungan |
| ddddddd. | Pengurangan Anggaran Kegiatan penyelenggaraan Safety Riding Pada Dinas Perhubungan |

- eeeeeee. Pengurangan Anggaran Kegiatan Sosialisasi DARTIBLANTAS tentang Kegunaan Perlengkapan Jalan dan Cara berlalu lintas kepada TK/PAUD Pada Dinas Perhubungan
- ffffff. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengembangan Sarana E-KIR Pada Dinas Perhubungan
- ggggggg. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemilihan Pelajar dan Mahasiswa Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Pada Dinas Perhubungan
- hhhhhhh. Pengurangan Anggaran Kegiatan Kerjasama Media Massa (Surat kabar, Radio, Televisi) Pada Dinas Perhubungan
- iiiiiii. Pengurangan Anggaran Kegiatan Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan dan Simpang Pada Dinas Perhubungan
- jjjjjjj. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pembangunan Pos GATUR Pada Dinas Perhubungan
- kkkkkkk. Pengurangan Anggaran Kegiatan Bimbingan teknis pengemudi angkutan umum Pada Dinas Perhubungan
- lllllll. Pengurangan Anggaran Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Perparkiran (On Street Parking) Pada Dinas Perhubungan

| | |
|----------|--|
| mmmmmmm. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan jembatan penyeberangan orang Pada Dinas Perhubungan |
| nnnnnnn. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Operasional Pelayanan Angkutan Sekolah Pada Dinas Perhubungan |
| ooooooo. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Operasional Pelayanan Angkutan Wisata Pada Dinas Perhubungan |
| ppppppp. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Penyusunan Feasibility Study Terminal Angkutan Barang Pada Dinas Perhubungan |
| qqqqqqq. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Dukungan Operasional Penyelenggaraan Perparkiran Pada Dinas Perhubungan |
| rrrrrrr. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Dukungan Operasional WASDAL GATUR Lalu Lintas Pada Dinas Perhubungan |
| sssssss. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan |
| ttttttt. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Operasional Penyelenggaraan Terminal Pada Dinas Perhubungan |
| uuuuuuu. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Operasional Forum LLAJ Pada Dinas Perhubungan |

| | |
|-----------|---|
| vvvvvvv. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pembangunan Pospam Terpadu Pada Dinas Perhubungan |
| wwwwwww. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Shelter Pada Dinas Perhubungan |
| xxxxxxx. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Penyusunan Feasibility Studi Ruang publik Terpadu Ramah Anak (Taman Lalu Lintas) Pada Dinas Perhubungan |
| yyyyyyy. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalin Kawasan Rawan Kemacetan Pada Dinas Perhubungan |
| zzzzzzz. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Operasional Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Pada Dinas Perhubungan |
| aaaaaaaa. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Penyusunan DED Pembangunan Gedung UPUBKB Pada Dinas Perhubungan |
| bbbbbbbb. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pembangunan Pangkalan Angkutan Perkotaan Pada Dinas Perhubungan |
| cccccccc. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu Pada Dinas Perhubungan |
| dddddddd. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan Pada Dinas Perhubungan |

| | |
|-----------|--|
| eeeeeeee. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan Pada Dinas Perhubungan |
| ffffffff. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Pada Dinas Perhubungan |
| gggggggg. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Median Jalan dan Pulau Lalu lintas Pada Dinas Perhubungan |
| hhhhhhhh. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Peningkatan dan Pemasangan APILL Pada Dinas Perhubungan |
| iiiiiiii. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Angkutan Umum Pada Dinas Perhubungan |
| jjjjjjjj. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Evaluasi Kinerja Angkutan Dalam Trayek Pada Dinas Perhubungan |
| kkkkkkkk. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Kajian Estimasi Harga Angkutan Perkotaan Pada Dinas Perhubungan |
| llllllll. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Evaluasi Kinerja Badan Hukum Angkutan Umum Pada Dinas Perhubungan |
| mmmmmmm. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Jalur Pesepeda Pada Dinas Perhubungan |

| | |
|-----------|---|
| nnnnnnnn. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Uji Petik Emisi Gas Buang Kendaraan Pada Dinas Perhubungan |
| oooooooo. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga PD Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| pppppppp. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| qqqqqqqq. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| rrrrrrrr. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan jaringan intranet dan internet (BACKBONE) Kota Bogor Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| ssssssss. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Wifi Ruang Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| tttttttt. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Grounding Listrik dan Erester Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| uuuuuuuu. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bogor Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |

| | |
|------------|--|
| vvvvvvvv. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Komunikasi Publik Berbasis Multimedia Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| wwwwwwwww. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Penyusunan Regulasi Penyelenggaraan Sistem Elektronik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| xxxxxxxxx. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| yyyyyyyyy. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan dan Pengelolaan Infrastruktur ruang kendali jaringan dan server Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| zzzzzzzzz. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan CCTV Kota Bogor Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| aaaaaaaaa. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| bbbbbbbbb. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Layanan Kemitraan dan Pengelolaan Media Dalam Penyebaran Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |

| | |
|-------------|--|
| cccccccc. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Bandwith Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| dddddddddd. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Statistik Sektoral Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| eeeeeeeeee. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Satu Data Statistik Sektoral Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| ffffffffff. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Penyajian Statistik Sektoral Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| gggggggggg. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| hhhhhhhhh. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga PD Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| iiiiiii. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Expo Permodalan UMKM Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| jjjjjjjj. | Pengurangan Anggaran Kegiatan SOLUSI (Sistem Operasional dan Layanan Usaha Mikro dan Sarana Promosi) Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| kkkkkkkkkk. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga PD Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

- lllllllll. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- mmmmmmmmm. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Perizinan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) (Database Perizinan) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- nnnnnnnnn. Pengurangan Anggaran Kegiatan Sosialisasi Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- ooooooooo. Pengurangan Anggaran Kegiatan Mall Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- ppppppppp. Pengurangan Anggaran Kegiatan Perizinan Dalam Angka Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- qqqqqqqqq. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- rrrrrrrrr. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga PD Pada Dinas Pemuda Dan Olah Raga

- sssssssss. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor Pada Dinas Pemuda Dan Olah Raga
- ttttttttt. Pengurangan Anggaran Kegiatan Peningkatan SDM Keolahragaan Pada Dinas Pemuda Dan Olah Raga
- uuuuuuuuuu. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga Pada Dinas Pemuda Dan Olah Raga
- vvvvvvvvv. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga PD Pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
- wwwwwwwww. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
- xxxxxxxxxxx. Pengurangan Anggaran Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD Pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
- yyyyyyyyyy. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pagelaran, Workshop Pengembangan SDM dan Kelembagaan Seni Pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
- zzzzzzzzzz. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pelestarian Nilai Sejarah Budaya dan Tradisional Pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
- aaaaaaaaaaa. Pengurangan Anggaran Kegiatan Promosi Pariwisata Pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

- bbbbbbbbbb. Pengurangan Anggaran Kegiatan Event Pariwisata Pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
- cccccccccc. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga PD Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
- dddddddddd. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
- eeeeeeeeee. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
- ffffffffff. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Umum dan Keliling Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
- gggggggggg. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
- hhhhhhhhh. Pengurangan Anggaran Kegiatan Penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM) Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
- iiiiiiiiii. Pengurangan Anggaran Kegiatan Peningkatan daya saing produk IKM Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
- jjjjjjjjj. Pengurangan Anggaran Kegiatan Penerapan Sertifikasi Industri Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

- kkkkkkkkkkk. Pengurangan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pada Walikota Dan Wakil Walikota
- lllllllllll. Pengurangan Anggaran Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Ngaji yang tidak Memiliki Pekerjaan Tetap Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
- mmmmmmmmmmm. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Media Publikasi Pada Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
- nnnnnnnnnnn. Pengurangan Anggaran Kegiatan Penataan Batas Wilayah dan Toponimi Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
- oooooooooooo. Pengurangan Anggaran Kegiatan Fasilitasi Penanganan Masalah Pertanahan Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
- ppppppppppp. Pengurangan Anggaran Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah Pada Bagian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah
- qqqqqqqqqqq. Pengurangan Anggaran Kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah Pada Bagian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah

- rrrrrrrrrr. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengolahan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum, Lembaran Daerah dan Berita Daerah serta Sosialisasi Pada Bagian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah
- ssssssssss. Pengurangan Anggaran Kegiatan Penanganan Perkara Perdata dan TUN serta Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah
- tttttttttt. Pengurangan Anggaran Kegiatan Penyuluhan Hukum dan RANHAM Pada Bagian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah
- uuuuuuuuuu. Pengurangan Anggaran Kegiatan Penyusunan LPPD dan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
- vvvvvvvvvv. Pengurangan Anggaran Kegiatan Penyusunan serta Penyampaian LKPJ Walikota Tahunan Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
- wwwwwwwww. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

- xxxxxxxxxxxxx. Pengurangan Anggaran Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundangan mengenai Pemerintah Daerah Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
- yyyyyyyyyyyyy. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
- zzzzzzzzzzzzz. Pengurangan Anggaran Kegiatan Keikutsertaan dalam APEKSI Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
- aaaaaaaaaaaaa. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pembinaan terhadap ASN Kecamatan dan Kelurahan Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
- bbbbbbbbbbbbb. Pengurangan Anggaran Kegiatan Lomba Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Bogor Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
- cccccccccccc. Pengurangan Anggaran Kegiatan Lomba Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Provinsi Jawa Barat Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
- dddddddddddd. Pengurangan Anggaran Kegiatan Penyusunan serta Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

- eeeeeeeeeee. Pengurangan Anggaran Kegiatan Penyusunan serta Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
- fffffffffff. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kerja Sama Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
- ggggggggggg. Pengurangan Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
- hhhhhhhhhhh. Pengurangan Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
- iiiiiiiiiii. Pengurangan Anggaran Kegiatan Penunjang Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah
- jjjjjjjjjjj. Pengurangan Anggaran Kegiatan Penunjang Kedinasan Sekretariat Daerah Kota Bogor Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah
- kkkkkkkkkkk. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga PD Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- lllllllllll. Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga PD Pada Kecamatan Bogor Utara

| | |
|----------------|--|
| mmmmmmmmmmmm. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor Pada Kecamatan Bogor Utara |
| nnnnnnnnnnnn. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD Pada Kecamatan Bogor Utara |
| ooooooooooooo. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan (lanjutan) Pada Kecamatan Bogor Utara |
| pppppppppppp. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga PD Pada Kecamatan Bogor Selatan |
| qqqqqqqqqqq. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor Pada Kecamatan Bogor Selatan |
| rrrrrrrrrrr. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Pada Kecamatan Bogor Selatan |
| sssssssssss. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD Pada Kecamatan Bogor Selatan |
| tttttttttt. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan Pada Kecamatan Bogor Selatan |
| uuuuuuuuuuu. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perekonomian di Kecamatan Pada Kecamatan Bogor Selatan |

| | |
|----------------|--|
| vvvvvvvvvvv. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sosial Budaya di Kecamatan Pada Kecamatan Bogor Selatan |
| wwwwwwwwwww. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga PD Pada Kecamatan Bogor Timur |
| xxxxxxxxxxxxx. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Pada Kecamatan Bogor Timur |
| yyyyyyyyyyyyy. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD Pada Kecamatan Bogor Timur |
| zzzzzzzzzzz. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sosial Budaya di Kecamatan Pada Kecamatan Bogor Timur |
| aaaaaaaaaaaaa. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Pada Kecamatan Bogor Timur |
| bbbbbbbbbbbbb. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga PD Pada Kecamatan Bogor Barat |
| cccccccccccc. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Pada Kecamatan Bogor Barat |
| dddddddddddd. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan Pada Kecamatan Bogor Barat |

| | |
|----------------|---|
| eeeeeeeeeeee. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga PD Pada Kecamatan Bogor Tengah |
| ffffffffffff. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Pada Kecamatan Bogor Tengah |
| ggggggggggggg. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perekonomian di Kecamatan Pada Kecamatan Bogor Tengah |
| hhhhhhhhhhhhh. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga PD Pada Kecamatan Tanah Sareal |
| iiiiiiiiiii. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor Pada Kecamatan Tanah Sareal |
| jjjjjjjjjjj. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Pada Kecamatan Tanah Sareal |
| kkkkkkkkkkkkk. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD Pada Kecamatan Tanah Sareal |
| lllllllllll. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan Pada Kecamatan Tanah Sareal |
| mmmmmmmmmmmm. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perekonomian di Kecamatan Pada Kecamatan Tanah Sareal |

| | |
|----------------|---|
| nnnnnnnnnnnn. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sosial Budaya di Kecamatan Pada Kecamatan Tanah Sareal |
| ooooooooooooo. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Pada Kecamatan Tanah Sareal |
| ppppppppppppp. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pembangunan di Kecamatan Pada Kecamatan Tanah Sareal |
| qqqqqqqqqqqqq. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga PD Pada Inspektorat Daerah |
| rrrrrrrrrrrrr. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor Pada Inspektorat Daerah |
| sssssssssssss. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Pada Inspektorat Daerah |
| ttttttttttttt. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Penerapan SPIP Pada Inspektorat Daerah |
| uuuuuuuuuuuuu. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Inspektorat Daerah |
| vvvvvvvvvvvvv. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Inspektorat Daerah |

| | |
|-------------------|---|
| wwwwwwwwwwwwww. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengawasan internal secara berkala Pada Inspektorat Daerah |
| xxxxxxxxxxxxxxxx. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pada Inspektorat Daerah |
| yyyyyyyyyyyyyy. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengembangan Sistem Pengawasan Berbasis IT Pada Inspektorat Daerah |
| zzzzzzzzzzzzzz. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga PD Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| aaaaaaaaaaaaaa. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Penguatan SIDA Kota Bogor Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| bbbbbbbbbbbbbb. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga PD Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah |
| cccccccccccccc. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah |
| dddddddddddddd. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Penyusunan APBD dan Penjabaran APBD Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah |
| eeeeeeeeeeeeee. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Penyusunan Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah |

| | |
|------------------|--|
| fffffffffffff. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis APBD Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah |
| ggggggggggggggg. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah |
| hhhhhhhhhhhhhhh. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Asistensi Penatausahaan Keuangan OPD Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah |
| iiiiiiiiiiiiiii. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Penyusunan KUA/ KUPA dan PPAS/PPASP Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah |
| jjjjjjjjjjjjj. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengadministrasian Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah |
| kkkkkkkkkkkkkkk. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Evaluasi Penggunaan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah |
| lllllllllllll. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Asuransi Kendaraan dan Bangunan Pemerintah Kota Bogor Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah |
| mmmmmmmmmmmmmm. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah |

| | |
|------------------|---|
| nnnnnnnnnnnnnn. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sistem Informasi BMD Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah |
| oooooooooooooo. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah |
| ppppppppppppppp. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Belanja Tidak Langsung Pada Badan Pendapatan Daerah |
| qqqqqqqqqqqqqq. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga PD Pada Badan Pendapatan Daerah |
| rrrrrrrrrrrrrrr. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor Pada Badan Pendapatan Daerah |
| sssssssssssssss. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Pada Badan Pendapatan Daerah |
| ttttttttttttt. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD Pada Badan Pendapatan Daerah |
| uuuuuuuuuuuuuuu. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah |
| vvvvvvvvvvvvvvv. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Verifikasi dan Penghitungan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah |

| | |
|---------------------|---|
| wwwwwwwwwwwwwwww. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Rekonsiliasi Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Penyusunan Zona Nilai Tanah Pada Badan Pendapatan Daerah |
| yyyyyyyyyyyyyyyy. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Intensifikasi Penagihan Piutang Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah |
| zzzzzzzzzzzzzzzz. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Sosialisasi dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah |
| aaaaaaaaaaaaaaaa. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Analisa dan Evaluasi Pada Badan Pendapatan Daerah |
| bbbbbbbbbbbbbbbb. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah |
| ccccccccccccccc. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah |
| ddddddddddddddd. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah |
| eeeeeeeeeeeeeee. | Pengurangan Anggaran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah |

sehingga keseluruhan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 19 Mei 2020

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 19 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2020 NOMOR 4 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003